

BUKU PROFIL

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH **(BPKPAD)**

ແບນສະເໜີລົງສາຂະກິດແຫ່ງຊາວ ແມ່ນປະເທດໄດ້ແຫ່ງ ຖະໜານ



KOMPLEKS PARASAMYA

JL. R.W. MONGINSIDI BANTUL 55711

Telp./Fax (0274) 368548, Psw 410

Website: www.bpkpad.bantulkab.go.id

Email: bpkpad@bantulkab.go.id

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Buku Profil Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah tahun 2021 ini dapat kami susun.

Sebagai lembaga yang mengemban amanah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, BPKPAD berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik kepada aparat Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat pengguna layanan.

Buku Profil ini disusun sebagai salah satu perwujudan dari transparansi Pemerintah Daerah serta untuk memberikan kemudahan bagi semua elemen masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan informasi keuangan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi seluruh masyarakat untuk kemajuan Kabupaten Bantul dimasa-masa yang akan datang.

Bantul, Oktober 2021
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah



DAFTAR ISI

1.	Kata Pengantar	1
2.	Daftar Isi	2
3.	Gambaran Umum Kabupaten Bantul	3
4.	Visi Misi	5
5.	Tujuan Tujuan Dan Sasaran BPKPAD	7
6.	Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .	8
7.	Pencapaian IKU 2020	10
8.	Sumber Daya Manusia	11
9.	Susunan Struktur Organisasi BPKPAD	12
10.	Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2016 S/D 2020	14
11.	Neraca Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2016 S/D 2020	16
12.	Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016 S/D 2020	26
13.	Tingkat Capaian PBB Per Kapanewon	27
14.	Perkembangan Tingkat Kepatuhan Pembayaran PBB P2 di Kabupaten Bantul	28
15.	Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2020	30
16.	Penerimaan Dana Transfer Tahun 2020	31
17.	Penyerapan DAK Fisik Dan Non Fisik 2020	32
18.	Belanja Modal Tahun Anggaran 2020	35
19.	BPKPAD News	36
20.	Galeri	50



GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANTUL



Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten dari empat kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak paling selatan dengan luas wilayah 506,85 km² atau 15,91% dari luas DIY.



Secara geografis Kabupaten Bantul terletak antara 140°04'50" – 270°50'50" Lintang Selatan dan 110°10'41" – 110°34'40" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- **Sebelah Selatan** : Samudera Hindia
- **Sebelah Barat** : Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman
- **Sebelah Timur** : Kabupaten Gunungkidul

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kapanewon yang dibagi menjadi 75 kalurahan dan 933 Pedukuhan.

Kapanewon tersebut yaitu :

1. Kapanewon Srandakan
2. Kapanewon Sanden
3. Kapanewon Kretek
4. Kapanewon Pundong
5. Kapanewon Bambanglipuro
6. Kapanewon Pandak
7. Kapanewon Pajangan
8. Kapanewon Bantul
9. Kapanewon Jetis
10. Kapanewon Imogiri
11. Kapanewon Dlingo
12. Kapanewon Banguntapan
13. Kapanewon Pleret
14. Kapanewon Piyungan
15. Kapanewon Sewon
16. Kapanewon Kasihan
17. Kapanewon Sedayu

Penduduk Bantul pada tahun 2020 sejumlah 954.706 jiwa dengan rincian berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

- | | |
|------------------|-----------------------|
| Laki-laki | : 475.871 jiwa |
| Perempuan | : 478.835 jiwa |



VISI MISI KABUPATEN BANTUL



VISI

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber Bhineka Tunggal Ika

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. **Harmonis yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.**
2. **Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.**
3. **Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata**

MISI

Adapun MISI Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.**
2. **Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.**
3. **Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.**
4. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana**
5. **Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.**



TUJUAN DAN SASARAN BPKPAD



TUJUAN

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel



SASARAN

- **Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah**
- **Meningkatnya kemampuan keuangan daerah**



TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD). BPKPAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Gambaran rincian fungsi BPKPAD sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Badan;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- c. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pertendaharaan umum daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pendataan, pelayanan dan penetapan pajak daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan penagihan, pengembangan dan pengawasan pendapatan daerah;
- i. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- j. pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- k. pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- l. pelaksanaan pembinaan administratif keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- m. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang pendapatan, anggaran, belanja, akuntansi serta aset;
- n. pengoordinasian penetapan, pemasangan dan pembongkaran reklame;
- o. penyusunan standarisasi barang dan standarisasi harga barang dan jasa;
- p. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
- q. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
- r. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- s. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, humas, kerjasama dan budaya pemerintahan pada Badan;
- t. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;
- u. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
- v. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Badan;
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



PENCAPAIAN IKU 2020

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020

No	Indikator Kinerja Utama	2020		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Opini Pemeriksaan BPK	1 (WTP)	1(WTP)	100
2	Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah	50%	69%	138
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	17%	17,32%	101,88
4	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	16%	18,46%	115,38

Sumber : esakip ROPK 2020



SUMBER DAYA MANUSIA

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah dalam menjalankan tugasnya melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, didukung oleh pegawai sejumlah 153 orang dengan rincian sebagai berikut (data per Maret 2021)

Berdasarkan status kepegawaian :

STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
PNS	111
Non PNS	42
Jumlah	153

Berdasarkan tingkat pendidikan :

PENDIDIKAN	JUMLAH
S2	12
S1	43
D3	17
SLTA	36
SLTP	3
Jumlah	111

Berdasarkan golongan :

GOLONGAN	JUMLAH
IV	6
III	78
II	25
I	2
Jumlah	111



SUSUNAN STUKTUR ORGANISASI BPKPAD

Adapun Susunan Stuktur Organisasi BPKPAD sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, adalah sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

- Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub. Bagian Program dan Pelaporan
- Sub. Bagian Keuangan dan Aset

2. BIDANG PERBENDAHARAAN

- Sub. Bidang Belanja Daerah
- Sub. Bidang Pengelolaan Kas Daerah

3. BIDANG ANGGARAN

- Sub. Bidang Perencanaan Anggaran
- Sub. Bidang Pengendalian Anggaran

4. BIDANG AKUNTANSI

- Sub. Bidang Pembukuan
- Sub. Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan

5. BIDANG ASET

- Sub. Bidang Perencanaan dan Optimalisasi BMD
- Sub. Bidang Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian BMD

6. BIDANG PELAYANAN DAN PENETAPAN

- Sub. Bidang Pelayanan dan Informasi Pajak **Derah**
- Sub. Bidang Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Daerah

7. BIDANG PENAGIHAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH

- Sub. Bidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
- Sub. Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan Pendapatan Daerah

8. UPTD dan

9. JABATAN FUNGSIONAL

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2016 S/D 2020

NO	URAIAN	TA 2016		% %	TA 2017		% %
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	
		7	8		9	10	
A	PENDAPATAN	2,092,568,355,760.60	2,009,334,166,353.84	95.59	2,095,073,460,546.68	2,086,878,989,570.45	99.61
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	373,241,806,617.00	404,454,703,746.07	108.36	458,042,255,770.19	494,179,068,471.97	107.89
1	Pajak Daerah	114,668,270,000.00	133,474,742,165.22	116.40	131,491,500,000.00	165,562,358,004.37	125.91
2	Retribusi Daerah	23,098,968,155.67	26,613,005,433.67	115.21	26,399,376,280.00	31,575,738,483.00	119.61
3	Hasi Pengel. Kekayaan Daerah yang dipisahkan	21,068,269,986.22	21,068,269,986.18	100.00	20,184,427,489.19	20,130,437,131.20	99.73
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	214,406,297,815.11	223,290,606,161.00	104.15	279,966,952,001.00	276,910,533,853.40	98.91
II	DANA PERIMBANGAN	1,466,779,753,000.00	1,331,352,777,163.00	90.77	1,339,148,831,640.00	1,287,256,262,558.00	96.12
1	Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	39,277,436,000.00	39,336,415,888.00	100.16	45,663,363,252.00	34,871,178,970.00	76.37
2	Dana Alokasi Umum	999,814,365,000.00	999,814,365,000.00	100.00	982,250,842,000.00	982,250,842,000.00	100.00
3	Dana Alokasi Khusus	427,687,952,000.00	292,199,996,275.00	68.32	311,234,628,388.00	270,134,431,580.00	86.79
	Dana Alokasi Khusus Fisik				72,673,537,000.00	68,459,917,286.00	94.20
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik				238,561,089,388.00	201,674,324,302.00	84.54
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	252,564,796,143.60	264,526,685,444.77	104.74	297,882,373,136.49	305,443,658,540.48	102.54
1	Pendapatan Hibah	6,250,000,000.00	6,148,735,500.00	98.38	8,880,122,258.00	10,598,764,728.00	119.35
2	Bagi Hasil Pajak dr Propinsi s/d Pemda lainnya/Hibah dari Pemerintah	122,724,051,143.60	137,137,204,944.77	111.74	139,206,072,057.49	145,068,714,991.48	104.21
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	99,912,945,000.00	99,912,945,000.00	100.00	131,691,087,000.00	131,691,087,000.00	100.00
4	Bantuan Keuangan dr Prop /Pemda Lainnya	23,677,800,000.00	21,327,800,000.00	90.08	18,105,091,821.00	18,085,091,821.00	99.89
5	Tunjangan Profesi Guru	-	-	-	-	-	-
6	Pendapatan lainnya	-	-	-	-	-	-
B	BELANJA	2,358,567,406,918.41	2,016,543,978,974.11	85.50	2,330,695,497,939.22	2,076,742,163,062.60	89.10
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,497,364,759,107.51	1,265,890,290,230.00	84.54	1,304,094,749,148.42	1,132,578,116,160.00	86.85
1	Belanja Pegawai	1,225,249,824,782.00	1,032,505,302,997.00	84.27	946,444,529,504.00	825,306,291,768.00	87.20
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	34,738,229,500.00	31,862,069,500.00	91.72	73,297,080,933.00	66,409,792,624.00	90.60
5	Belanja Bantuan Sosial	5,578,550,000.00	3,267,350,000.00	58.57	3,901,100,000.00	1,650,300,000.00	42.30
6	Belanja Bagi Hasil kpd Pem. Prop/Kab/Kota dan Desa	12,664,759,430.00	12,429,995,580.00	98.15	14,330,194,685.00	14,330,194,685.00	100.00
7	Belanja Bantuan Keu kpd Pem. Prop, Pemda dan Pem. Bawahans	195,396,577,000.00	185,304,699,853.00	94.84	231,802,574,900.00	222,760,211,526.00	96.10
8	Belanja Tidak Terduga	23,736,818,395.51	520,872,300.00	2.19	34,319,269,126.42	2,121,325,557.00	6.18
II	BELANJA LANGSUNG	861,202,647,810.90	750,653,688,744.11	87.16	1,026,600,748,790.80	944,164,046,902.60	91.97
1	Belanja Pegawai	50,819,149,200.00	44,678,753,435.00	87.92	73,583,148,206.00	69,976,098,898.00	95.10
2	Belanja Barang dan Jasa	481,755,149,995.90	421,914,402,647.16	87.58	594,956,668,673.80	541,568,682,551.46	91.03
3	Belanja Modal	328,628,348,615.00	284,060,532,661.95	86.44	358,060,931,911.00	332,619,265,453.14	92.89
C	SURPLIS (DEFISIT) PEMBIAYAAN	(265,981,051,157.81)	(16,209,812,620.27)	6.09	(235,622,037,392.54)	10,136,826,507.85	(4.30)
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	292,736,051,157.81	293,078,441,725.81	100.12	261,482,037,392.54	261,454,280,812.54	99.99
1	Sisa Lebih Perhitungan Th lalu	283,026,051,157.81	283,026,051,157.81	100.00	254,772,037,392.54	254,841,678,796.54	100.03
2	Penerimaan Piutang Daerah/Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	9,710,000,000.00	8,710,516,768.00	89.71	6,710,000,000.00	6,612,602,016.00	98.55
3	Penerimaan pinjaman daerah	-	1,341,873,800.00	-	-	-	-
4	Jual Beli Aset Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	26,755,000,000.00	24,752,000,000.00	92.51	25,860,000,000.00	24,364,800,000.00	94.22
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16,045,000,000.00	16,045,000,000.00	100.00	17,150,000,000.00	17,150,000,000.00	100.00
2	Pembayaran Hutang Pokok yang Jatuh Tempo	10,710,000,000.00	8,707,000,000.00	81.30	8,710,000,000.00	7,214,800,000.00	82.83
	SISA LBH PEMBIAYAAN ANGG.TA BERKENAAN	265,981,051,157.81	268,326,441,725.81	100.88	235,622,037,392.54	237,089,480,812.54	100.62

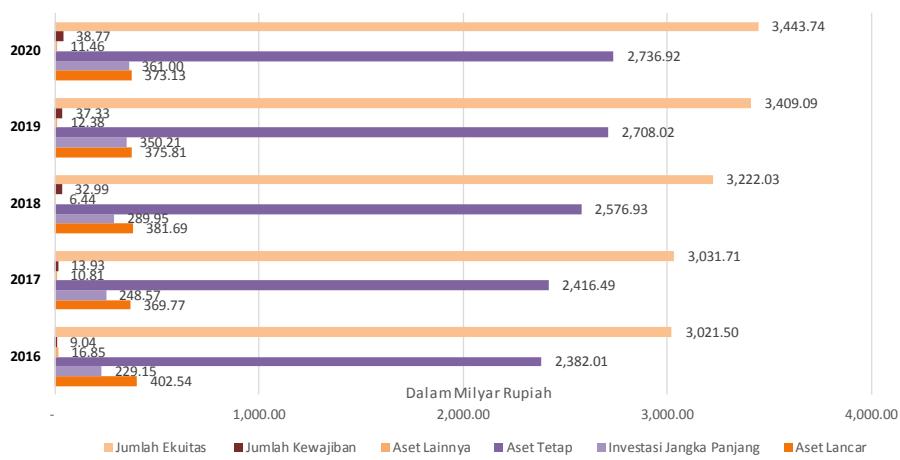
Sumber Data : BKAD Kab. Bantul

TA 2018		%	TA 2019		%	TA 2020		%
ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	
11	12		13	14		13	14	
2,206,505,821,341.60	2,227,753,027,348.97	100.96	2,258,180,662,975.05	2,269,539,168,277.63	100.50	2,157,411,830,374.19	2,104,840,663,186.42	97.56
432,545,767,309.00	462,654,956,229.75	106.96	467,159,577,195.41	505,929,472,001.63	108.30	420,780,615,321.87	479,610,812,119.42	113.98
160,071,100,000.00	182,127,309,683.88	113.78	198,715,500,000.00	213,628,741,844.18	107.50	175,265,482,000.00	200,826,187,667.73	114.58
39,146,388,042.00	46,053,820,246.00	117.64	42,959,909,608.00	48,278,231,843.00	112.38	24,354,322,386.00	30,465,840,962.75	125.09
19,652,871,722.00	19,652,871,723.03	100.00	21,883,863,426.19	21,945,038,058.10	100.28	24,704,142,455.07	25,137,579,049.59	101.75
213,675,407,545.00	214,821,154,576.84	100.54	203,600,304,161.22	222,077,460,256.35	109.08	196,456,668,480.80	223,181,204,439.35	113.60
1.377.353.885.000.00	1.355.455.930.302.00	98.41	1.388.065.951.692.00	1.351.157.100.831.00	97.34	1.279.745.464.554.00	1.268.337.753.395.00	99.11
39,033,468,000.00	30,584,172,190.00	78.35	30,721,406,100.00	19,947,001,549.00	64.93	31,097,246,000.00	36,480,471,625.00	117.31
982,250,842,000.00	982,250,842,000.00	100.00	1,015,302,849,000.00	1,015,302,849,000.00	100.00	931,996,005,000.00	923,213,607,000.00	99.06
356,069,575,000.00	342,620,916,112.00	96.22	342,041,696,592.00	315,907,250,282.00	92.36	316,652,213,554.00	308,643,674,770.00	97.47
116,562,889,000.00	112,795,458,069.00	96.77	95,575,904,592.00	91,840,596,690.00	96.09	87,962,960,000.00	79,954,421,216.00	-
239,506,686,000.00	229,825,458,043.00	95.96	246,465,792,000.00	224,066,653,592.00	90.91	228,689,253,554.00	228,689,253,554.00	100.00
396.606.169.032.60	409.642.140.817.22	103.29	402.955.134.087.64	412.452.595.445.00	102.36	456.885.750.498.32	356.892.097.672.00	78.11
139,820,466,600.00	139,341,833,553.00	99.66	78,199,300,771.00	77,281,170,982.00	98.83	82,217,388,420.00	83,860,183,000.00	102.00
141,733,294,432.60	155,587,029,264.22	109.77	154,194,885,782.60	164,965,839,463.00	106.99	152,821,840,588.32	159,398,655,115.00	104.44
113,326,105,000.00	113,326,105,000.00	100.00	165,849,585,000.00	165,849,585,000.00	100.00	191,198,028,000.00	86,583,558,000.00	45.10
1,726,073,000.00	1,387,173,000.00	80.37	4,598,000,000.00	4,356,000,000.00	94.74	30,057,493,490.00	27,049,701,557.00	89.99
-	-	-	113,362,534.04	-	-	-	-	-
2.422.007.128.661.99	2.165.651.760.352.96	89.42	2.504.062.661.991.45	2.283.585.037.902.49	91.20	2.383.458.652.405.17	2.093.719.168.702.17	87.84
1.261.752.924.864.74	1.149.437.745.900.77	91.10	1.256.133.050.319.45	1.180.250.623.744.00	93.96	1.389.050.261.074.07	1.170.873.717.698.78	84.29
885,420,989,644.40	826,969,448,856.00	93.40	881,935,648,047.54	838,871,806,847.00	95.12	864,539,520,207.34	799,455,130,819.00	92.47
-	-	-	400,000,000.00	39,333,333.00	9.63	-	-	-
70,579,778,000.00	51,811,098,937.77	73.41	68,964,539,000.00	59,645,560,800.00	86.49	87,919,851,200.00	84,737,761,664.00	96.38
9,118,200,000.00	7,852,092,250.00	86.11	9,047,520,000.00	6,920,020,000.00	76.49	2,835,000,000.00	759,900,000.00	26.80
17,798,976,200.00	17,798,976,196.00	100.00	22,290,550,000.40	22,290,550,000.00	100.00	22,871,517,593.40	22,871,517,591.78	100.00
245,899,459,171.00	244,600,587,161.00	99.47	256,814,876,251.00	251,170,936,014.00	97.80	268,118,528,110.00	161,477,548,110.00	60.23
32,935,521,849.34	405,542,500.00	1.23	16,679,917,020.51	1,312,416,750.00	7.87	142,765,843,963.33	101,571,859,514.00	71.15
1.160.254.203.797.25	1.016.214.014.452.19	87.59	1.247.929.611.672.00	1.103.334.414.158.49	88.41	994.408.391.331.10	922.845.451.003.39	92.80
99,513,273,546.95	93,830,065,697.00	94.29	119,646,415,144.00	113,645,098,184.00	94.99	129,562,208,540.00	126,114,463,190.00	97.34
639,044,814,735.99	584,223,835,856.00	91.42	686,139,282,825.00	652,974,844,349.88	95.17	630,734,900,915.10	580,328,990,133.45	92.01
421,696,115,514.81	338,160,112,904.53	80.19	442,145,713,703.00	336,714,471,624.61	76.15	234,111,281,876.00	216,401,997,679.94	92.44
(215,501,307,320.39)	62,101,266,996.01	(28.82)	(245,881,999,016.40)	(14,045,869,624.86)	5.71	(226,046,822,030.98)	11,121,494,484.25	(4.92)
257.936.307.320.39	256.630.482.020.39	99.49	307.841.999,016.40	296.985.005.918.40	96.47	263.047.636.293.60	238.678.713.544.54	90.74
247,226,307,320.39	247,144,690,990.39	99.97	279,158,249,016.40	279,158,249,016.40	100.00	234,047,636,293.60	234,047,636,293.60	100.00
10,710,000,000.00	9,485,791,030.00	88.57	10,710,000,000.00	7,853,006,902.00	73.32	11,000,000,000.00	3,917,740,046.00	35.62
-	-	-	15,000,000,000.00	7,000,000,000.00	46.67	18,000,000,000.00	-	-
-	-	-	2,973,750,000.00	2,973,750,000.00	100.00	-	713,337,205.00	-
42.435.000.000.00	39.572.500.000.00	93.25	61.960.000.000.00	48.891.500.000.00	78.91	37.000.814.262.62	11.598.814.262.62	31.35
31,500,000,000.00	31,500,000,000.00	100.00	34,825,000,000.00	34,300,000,000.00	98.49	8,000,814,262.62	8,000,814,262.62	100.00
10,935,000,000.00	8,072,500,000.00	73.82	12,135,000,000.00	7,591,500,000.00	62.56	11,000,000,000.00	3,598,000,000.00	32.71
215.501.307.320.39	217.057.982.020.39	100.72	245.881.999,016.40	248.093.505.918.40	100.90	226.046.822.030.98	227.079.899.281.92	100.46
-	-	-	234,047,636,293.54	-	-	-	238,201,393,766.17	-
279,159,249,016.40	-	-	-	-	-	-	-	-



NERACA PEMERINTAH DAERAH PER 31 DESEMBER 2016 S/D 2020

GRAFIK NERACA
TAHUN ANGGARAN 2016 S/D 2020



(dalam Rupiah)

	2016	2017	2018	2019	2020
ASET LANCAR	402,536,133,971.00	369,773,285,369.96	381,689,011,024.14	375,809,628,545.66	373,132,656,181.73
INVESTASI JANGKA PANJANG	229,152,262,959.00	248,569,576,110.98	289,951,934,987.86	350,211,800,815.80	360,999,866,954.98
ASET TETAP	2,382,007,576,606.00	2,416,488,150,738.73	2,576,933,983,851.41	2,708,023,206,446.68	2,736,921,098,950.26
ASET LAINNYA	16,851,457,495.00	10,806,982,980.78	6,436,173,889.45	12,375,105,970.16	11,458,420,207.73
JUMLAH KEWA-JIBAN	9,042,658,284.00	13,928,880,598.80	32,990,815,170.10	37,329,954,705.47	38,770,774,083.57
JUMLAH EKUITAS	3,021,504,772,747.00	3,031,709,114,601.65	3,222,029,288,582.75	3,409,089,787,072.84	3,443,741,268,211.12

Sumber Data : BKAD Kab. Bantul 2020

NO	U R A I A N		2016
A	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas		296,308,785,282.00
		Kas di Kas Daerah	221,268,668,754.00
		Kas di Pemegang Kas/Bendahara Pengeluaran	74,654,448.00
		Kas di Bendahara Penerimaan	460,910,384.00
		Kas di BLUD	30,269,625,120.00
		Kas Bantuan	
		Kas Lancar Lainnya	
		Kas di Bendahara BOS	17,353,282,450.00
		Kas di Bendahara Blockgrant	26,837,712,126.00
		Kas di KPU dan Panwas	-
		Kas di pengelola dana bergulir	43,932,000.00
	Piutang		49,605,707,271.00
		Piutang Pajak	85,821,335,423.00
		Penyisihan Piutang Pajak	(49,426,187,389.00)
		Piutang Pajak Neto	36,395,148,035.00
		Piutang Retribusi	2,087,948,332.00
		Penyisihan Piutang Retribusi	(50,500,464.00)
		Piutang Retribusi Netto	2,037,447,868.00
		Piutang Lain-lain PAD	35,055,495,307.00
		Penyisihan Piutang Lain-lain PAD	(23,882,383,938.00)
		Piutang Lain-lain PAD Netto	11,173,111,368.00
		Piutang Lainnya/Belanja dibayar dimuka	969,489,397.00
		Piutang Bag Lancar TGR	46,302,100.00
		Piutang lainnya(Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat)	14,204,551,854.00
		Penyisihan Piutang Lainnya	(8,793,485,753.00)

2017	2018	2019	2020
247,225,967,225.39	279,201,069,180.40	234,221,742,886.54	238,201,393,766.17
229,851,336,932.90	262,466,433,453.75	209,212,057,577.20	200,803,065,465.07
833,005,672.00	895,288,887.04	517,382,679.14	577,835,200.00
713,824,537.00	202,892,821.00	144,893,486.00	114,418,736.00
13,541,504,539.49	13,932,533,083.61	18,688,863,886.20	29,197,443,270.10
2,281,585,544.00	1,703,920,935.00	5,658,545,258.00	7,508,631,095.00
-	-	-	-
-	-	-	-
4,710,000.00	-	-	-
64,302,519,438.74	66,825,617,211.05	79,054,966,423.85	63,139,859,320.17
97,093,170,135.37	106,385,740,776.79	120,990,006,410.99	130,486,662,478.99
(58,055,308,122.59)	(65,663,925,171.19)	(73,764,443,404.89)	(83,337,103,485.24)
39,037,862,012.78	40,721,815,605.60	47,225,563,006.10	47,149,558,993.75
2,336,181,963.65	1,162,781,234.15	965,762,320.86	1,229,028,166.85
(54,447,541.61)	(55,663,242.15)	(81,290,251.61)	(68,504,614.18)
2,281,734,422.04	1,107,117,992.00	884,472,069.25	1,160,523,552.67
50,808,323,946.65	56,653,223,725.63	66,623,914,284.60	55,014,174,114.87
(27,825,400,942.73)	(31,656,540,112.18)	(35,678,982,936.10)	(40,184,397,341.12)
22,982,923,003.92	24,996,683,613.45	30,944,931,348.50	14,829,776,773.75
375,616,706.27	1,286,866,564.57	1,155,845,948.39	1,353,626,878.84
23,125,600.00	4,989,600.00	-	-
14,776,862,986.00	13,340,761,956.00	13,043,382,057.00	12,713,282,011.00
(9,264,018,934.00)	(9,673,315,403.00)	(9,961,494,004.00)	(10,177,475,432.25)

		Piutang Pemberian Pinjaman Pemerintah/Piutang Lainnya Netto	5,411,066,101.00
		Piutang lain-lain	1,420,076,050.00
	Persediaan		48,774,707,770.00
	Jumlah Aset Lancar		402,536,133,971.00
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Non Permanen		
	Pinjaman Jangka Panjang		
	Investasi dalam SUN		
	Investasi Non Permanen lainnya		
		Jumlah Investasi Nonpermanen	
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		117,590,549,808.00
	Investasi Permanen Lainnya		111,561,713,151.00
	Jumlah Investasi Permanen		229,152,262,959.00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		229,152,262,959.00
3	ASET TETAP		
	Tanah		535,067,314,152.00
	Peralatan dan Mesin		514,461,731,544.00
	Gedung dan Bangunan		1,261,647,454,205.00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan		1,821,460,231,355.00
	Aset Tetap Lainnya		73,057,689,969.00
	Konstruksi dalam Pengerjaan		644,050,000.00
	Akumulasi Penyusutan		(1,824,330,894,619.00)
	Jumlah Aset Tetap		2,382,007,576,606.00
	Dana cadangan		
	Dana Cadangan		-

5,512,844,052.00	3,667,446,553.00	3,081,888,053.00	2,535,806,578.75
2,699,133,340.86	-	4,565,313,667.00	5,230,278,485.00
49,634,079,006.70	30,712,021,915.12	53,729,871,566.88	62,671,691,152.79
369,773,285,369.96	381,698,011,024.14	375,809,628,545.66	373,132,656,181.72
129,528,808,609.90	141,614,648,647.87	192,310,420,017.80	201,398,147,561.17
119,040,767,501.08	148,337,286,339.99	157,901,380,798.00	159,601,719,393.81
248,569,576,110.98	289,951,934,987.86	350,211,800,815.80	360,999,866,954.98
248,569,576,110.98	289,951,934,987.86	350,211,800,815.80	360,999,866,954.98
517,919,614,242.00	517,793,609,992.00	518,697,554,092.00	528,259,669,252.00
561,102,664,150.57	697,431,861,949.87	795,637,620,715.69	857,132,572,729.50
1,194,597,731,231.78	1,249,672,267,649.94	1,322,393,411,270.17	1,347,477,527,787.88
1,973,041,023,200.00	2,107,565,021,860.11	2,279,618,395,258.90	2,418,835,722,267.21
65,734,074,972.00	72,473,448,275.18	76,633,860,413.70	74,559,439,255.28
(1,895,906,957,057.62)	(2,068,002,225,875.69)	(2,284,957,635,303.78)	(2,489,343,832,341.61)
2,416,488,150,738.73	2,576,933,983,851.41	2,708,023,206,446.68	2,736,921,098,950.26
-	-	-	-

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

		Jumlah Dana Cadangan	-
4	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran		
	Piutang Angsuran/Tagihan Jangka Panjang	764,419,414.00	
	TGR		
	Aset Tak Berwujud	17,412,173,338.00	
	Aset Lain-lain	6,350,410,718.00	
	Aset lain yang dibatasi penggunaannya	238,727,239.00	
	Akumulasi Amortisasi Aset tak berwujud	(7,914,273,215.00)	
	Jumlah Aset Lainnya	16,851,457,495.00	
	JUMLAH ASET	3,030,547,431,031.00	
B	PASIVA/KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PKF)	1,161,600.00	
	Utang Bunga	-	
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri/Utang Jangka Panjang	-	
	Pemerintah Pusat	-	
	Pendapatan diterima dimuka	54,070,543.00	
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	
	Utang Belanja	8,987,426,141.00	
	Utang Pihak Ketiga	-	
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	9,042,658,284.00	
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		
	Utang Dalam Negeri - Obligasi		
	Premium (diskonto) obligasi		
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	

-	-	-	-
742,769,414.00	15,311,414.00	15,311,414.00	15,311,414.00
19,945,487,938.44	18,926,953,566.49	28,169,681,589.88	24,725,518,327.43
229,284,603.45	238,882,149.45	795,205,530.45	1,501,519,876.00
(10,110,558,975.11)	(12,744,973,240.49)	(16,605,092,564.17)	(14,783,929,409.70)
10,806,982,980.78	6,436,173,889.45	12,375,105,970.16	11,458,420,207.73
3,045,637,995,200.45	3,255,020,103,752.86	3,446,419,741,778.30	3,482,512,042,294.69
-	42,820,164.00	29,213,107.00	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
211,677,621.80	2,358,808,158.10	2,097,987,840.47	1,920,229,253.27
-	-	-	-
13,717,202,977.00	30,589,186,848.00	35,202,753,758.00	36,850,544,830.30
-	-	-	-
13,928,880,598.80	32,990,815,170.10	37,329,954,705.47	38,770,774,083.57
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

	JUMLAH KEWAJIBAN	9,042,658,284.00
C	EKUITAS DANA	
1	EKUITAS DANA LANCAR	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-
	Cadangan Pendapatan yang ditangguhkan	-
	Cadangan Investasi Jangka Pendek	-
	Cadangan Piutang	-
	Cadangan Persediaan	-
	Dana Lancar lainnya	-
	Dana yang Harus Disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	-
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	-
2	EKUITAS DANA INVESTASI	
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	-
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	-
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	-
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	-
	JUMLAH EKUITAS	3,021,504,772,747.00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3,030,547,431,031.00

13,928,880,598.80	32,990,815,170.10	37,329,954,705.47	38,770,774,083.57
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3,031,709,114,601.65	3,222,029,288,582.75	3,409,089,787,072.84	3,443,741,268,211.12
3,045,637,995,200.45	3,255,020,103,752.85	3,446,419,741,778.31	3,482,512,042,294.69



REALISASI PAJAK DAERAH TAHUN 2016 S/D 2020

Pemungutan 11 pajak daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah oleh BPKPKD. Perkembangan pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah selama lima tahun (tahun 2016-2020) adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi (Rupiah)				
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Pajak Hotel	1.349.735.081,00	1.569.261.167,00	2.725.071.153,00	3.841.960.122,00	1.458.163.865,00
Pajak Restoran	7.013.976.166,37	8.975.258.421,00	12.200.886.407,63	15.137.093.141,00	9.207.214.234,78
Pajak Hiburan	799.304.711,00	664.967.875,00	1.224.474.750,00	811.374.242,80	263.763.420,00
Pajak Reklame	2.448.503.082,00	2.196.366.698,00	2.446.041.981,00	2.314.177.264,00	2.213.962.903,00
Pajak Penerangan Jalan	29.754.039.669,00	36.105.826.697,00	40.386.521.630,00	43.987.340.643,00	44.426.085.055,00
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	677.507.436,50	1.909.569.372,12	2.169.770.641,50	943.673.954,00	750.864.250,00
Pajak Parkir	102.216.396,00	121.015.120,00	178.719.292,00	237.965.761,00	81.259.663,00
Pajak Air Bawah Tanah	315.820.746,00	638.031.158,00	729.053.714,00	743.337.273,00	650.908.528,00
Pajak Sarang Burung Walet	1.850.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan	30.063.234.780,00	36.517.914.632,00	39.327.997.070,00	54.785.787.180,00	56.328.043.101,00
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	60.948.554.097,35	76.862.647.864,25	80.737.173.044,75	90.824.632.263,38	85.444.472.647,95
J u m l a h	133.474.742.165,22	165.562.359.004,37	182.127.309.683,88	213.628.741.844,18	200.826.187.667,73

Sumber data: Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul 2016-2020



TINGKAT CAPAIAN PBB PER KAPANEWON

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB sebelum jatuh tempo, BPKPKD selalu melakukan sosialisasi kepada panewu, lurah dan dukuh. Capaian pelunasan PBB masing-masing kapanewon sebagai berikut :

Kapanewon	2016	2017	2018	2019	2020
Srandakan	659,356,249	814,454,928	922,360,908	1,359,047,122	1,344,466,797
Sanden	766,000,884	1,052,202,777	1,193,906,447	1,870,155,391	2,056,572,011
Kretek	669,950,263	924,942,810	978,026,842	1,589,413,105	1,645,911,081
Pundong	525,015,591	678,173,187	752,357,136	1,274,628,043	1,327,169,872
Bambanglipuro	597,922,276	782,175,161	841,226,670	1,356,530,607	1,417,667,589
Pandak	1,019,827,031	1,339,938,643	1,398,588,480	2,125,753,250	2,311,253,773
Bantul	2,369,684,764	3,070,606,118	3,064,598,249	4,157,931,004	4,263,328,071
Jetis	964,271,360	1,235,761,454	1,343,815,808	2,063,388,423	2,063,606,841
Imogiri	690,074,630	899,424,827	970,637,833	1,630,513,833	1,783,043,358
Dlingo	362,415,685	505,957,775	518,456,532	956,060,017	1,017,148,229
Pleret	784,965,456	978,653,273	1,054,095,494	1,651,820,874	1,701,225,661
Piyungan	1,788,695,679	2,347,975,988	2,502,330,959	3,792,897,040	3,649,432,962
Banguntapan	6,206,465,123	6,957,550,084	7,396,643,804	9,741,345,582	9,927,323,527
Sewon	4,907,276,167	5,956,240,779	6,727,203,935	7,867,332,904	7,728,987,597
Kasihan	4,968,603,772	5,511,633,583	5,963,907,693	7,812,497,063	8,242,639,821
Pajangan	633,644,683	824,038,742	865,731,809	1,457,700,954	1,585,274,604
Sedayu	2,184,000,026	2,657,033,121	2,834,003,417	4,078,736,968	4,250,980,136
Total	30,098,169,639	36,536,763,250	39,327,892,016	54,785,754,199	56,316,033,950

Sumber Data : Bidang Penagihan dan Pemeriksaan 2020



PERKEMBANGAN TINGKAT KEPATUHAN PEMBAYARAN PBB P2 DI KABUPATEN BANTUL

Realisasi Pembayaran PBB P2

Kapanewon	Realisasi Penerimaan PBB P2 Kabupaten Bantul			Pembayaran PBB P2 Melalui Mobil Keliling		
	2019	2020	% 2020 terhadap 2019	2020	% terhadap penerimaan 2020	% terhadap penerimaan 2019
Srandakan	1,359,047,122	1,345,313,593	99%	504,285,551	37.48%	37.11%
Sanden	1,870,155,391	2,056,572,011	110%	437,410,344	21.27%	23.39%
Kretek	1,589,413,105	1,645,911,081	104%	935,433,903	56.83%	58.85%
Pundong	1,274,628,043	1,327,169,872	104%	800,631,117	60.33%	62.81%
Bambanglipuro	1,356,530,607	1,417,667,589	105%	505,619,468	35.67%	37.27%
Pandak	2,125,753,250	2,311,279,729	109%	689,869,878	29.85%	32.45%
Bantul	4,157,931,004	4,263,705,037	103%	739,696,884	17.35%	17.79%
Jetis	2,063,388,423	2,063,717,417	100%	1,000,747,595	48.49%	48.50%
Imogiri	1,630,513,833	1,783,043,358	109%	968,742,108	54.33%	59.41%
Dlingo	956,060,017	1,017,148,229	106%	251,509,011	24.73%	26.31%
Pleret	1,651,820,874	1,701,998,529	103%	742,790,771	43.64%	44.97%
Piyungan	3,792,897,040	3,649,432,962	96%	1,368,175,969	37.49%	36.07%
Banguntapan	9,741,345,582	9,932,290,952	102%	1,578,250,398	15.89%	16.20%
Sewon	7,867,332,904	7,729,822,593	98%	1,148,062,678	14.85%	14.59%
Kasihan	7,812,497,063	8,244,963,372	106%	1,223,891,154	14.84%	15.67%
Pajangan	1,457,700,954	1,585,666,070	109%	284,960,373	17.97%	19.55%
Sedayu	4,078,736,968	4,252,340,707	104%	171,863,970	4.04%	4.21%
TOTAL	54,785,754,199	56,328,045,121	103%	13,351,943,192	23.70%	24.37%

Sumber data: **Bidang Penagihan dan Pemeriksaan**

Realisasi Pembayaran PBB P2 melalui Mobil Keliling Pajak Bantul Berdasar Jumlah Lembar SPPT

Kapanewon	Realisasi Penerimaan PBB P2 Kabupaten Bantul			Pembayaran PBB P2 Melalui Mobil Keliling		
	2019	2020	% 2020 terhadap 2019	2020	% terhadap penerimaan 2020	% terhadap penerimaan 2019
Srandakan	19,408	18,154	94%	8,367	46.09%	43.11%
Sanden	26,985	28,612	106%	6,175	21.58%	22.88%
Kretek	24,307	25,305	104%	14,990	59.24%	61.67%
Pundong	33,534	30,825	92%	20,429	66.27%	60.92%
Bambanglipuro	32,461	32,254	99%	13,212	40.96%	40.70%
Pandak	37,928	36,481	96%	14,067	38.56%	37.09%
Bantul	35,173	33,044	94%	7,496	22.68%	21.31%
Jetis	40,099	37,861	94%	21,364	56.43%	53.28%
Imogiri	32,422	31,716	98%	20,778	65.51%	64.09%
Dlingo	23,807	25,297	106%	5,493	21.71%	23.07%
Pleret	21,681	21,201	98%	11,235	52.99%	51.82%
Piyungan	29,491	27,120	92%	13,604	50.16%	46.13%
Banguntapan	39,481	34,651	88%	6,277	18.11%	15.90%
Sewon	43,371	38,728	89%	10,095	26.07%	23.28%
Kasihan	39,376	35,239	89%	10,351	29.37%	26.29%
Pajangan	24,851	22,935	92%	4,104	17.89%	16.51%
Sedayu	29,943	27,328	91%	1,863	6.82%	6.22%
TOTAL	534,318	506,751	95%	189,900	37.47%	35.54%

PELAYANAN PAJAK DAERAH TAHUN 2020

Kegiatan pelayanan pajak daerah dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak merasa puas dan kesadaran untuk memenuhi kewajibannya semakin meningkat.

Selama tahun 2020 petugas pelayanan pajak telah melayani 11 jenis pajak dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS PAJAK	JUMLAH	KETERANGAN
1	PBB P2	7.945	Permohonan pelayanan
2	BPHTB	12.369	Permohonan pelayanan
3	Pajak Reklame	378	Pendaftaran Obyek Pajak Baru
4	Pajak Restoran	33	Pendaftaran Obyek Pajak Baru
5	Pajak Hotel	6	Pendaftaran Obyek Pajak Baru
6	Pajak Parkir	3	Pendaftaran Obyek Pajak Baru
7	Pajak MBLB	21	Pendaftaran Obyek Pajak Baru
8	Pajak Air Tanah	12	Pendaftaran Obyek Pajak Baru
9	Pajak Hiburan	3	Pendaftaran Obyek Pajak Baru
10	Pajak Sarang Burung Walet	0	Pendaftaran Obyek Pajak Baru
11	Pajak Penerangan Jalan	0	Pendaftaran Obyek Pajak Baru

Sumber : Bidang Pelayanan dan Penetapan 2019



PENERIMAAN DANA TRANSFER TAHUN 2020

Dana transfer merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang memberi kontribusi tinggi terhadap pendapatan daerah. Tahun 2020 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DIY telah menyalurkan dana transfer ke Rekening Kas Umum Daerah dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Dana Transfer Pemerintah Pusat			
	Bagi Hasil dari Pajak/Bukan Pajak	31.097.246.000,00	36.480.471.625,00	117,31%
	Dana Alokasi Umum	931.996.005.000,00	923.213.607.000,00	55,91%
	Dana Alokasi Khusus	316.652.213.554,00	308.643.674.770,00	97,47%
2	Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya			
	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	191.989.028.000,00	86.583.558.000,00	45,10%
3	Dana Transfer Pemerintah Daerah Lainnya			
	Bagi Hasil Pajak	152.621.840.588,32	159.398.655.115,00	104,44%
4	Bantuan Keuangan – LRA			
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah/ Propinsi/Lainnya-LRA	30.057.493.490,00	27.049.701.557,00	89,99%
	Jumlah	1.654.413.826.632,32	1.541.369.668.067,00	93,17%

Sumber: Bidang Perbendaharaan BKAD



PENYERAPAN DAK FISIK DAN NON FISIK TAHUN 2020

Tahun 2020 Kabupaten Bantul memperoleh DAK Fisik sebanyak 13 (tiga belas) bidang dengan OPD pengampu : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan. Realisasi penyerapan DAK Fisik tahun 2020 sebagai berikut :

ALOKASI, ANGGARAN DAN REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TA 2020

No	Bidang/Subbidang	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Sisa Dana di RKUD
		(Rp)	(Rp)	
1	DAK Bidang Pendidikan	8.633.861.000,00	8.602.072.000,00	31.789.000,00
2	DAK Bidang Kesehatan	38.765.096.000,00	42.134.962.422,00	(3.369.866.422,00)
3	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	16.006.005.000,00	11.719.053.850,00	4.286.951.150,00
4	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	3.450.000.000,00	2.304.690.000,00	1.145.310.000,00
5	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	7.495.846.000,00	7.263.280.500,00	232.565.500,00
6	DAk Bidang Infrastruktur Sanitasi	3.298.800.000,00	3.298.800.000,00	0
7	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	618.483.000,00	441.555.444,00	176.927.556,00
8	DAK Bidang Pertanian	1.164.675.000,00	1.152.775.000,00	11.900.000,00
9	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.546.832.000,00	2.546.832.000,00	0,00
10	DAK Bidang Sosial	490.400.000,00	490.400.000,00	0,00
11	DAK Bidang Pariwisata	328.047.950,00	328.047.950,00	0,00
12	DAK Bidang Keluarga Berencana	5.492.962.000,00	0,00	5.492.962.000,00
Jumlah		88.291.007.950,00	80.282.469.166,00	8.088.538.784,00

Sumber: Bidang Perbendaharaan BKAD

ALOKASI, ANGGARAN DAN REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TA 2020

NO	BIDANG/SUBBIDANG	ANGGARAN 2020 (RP)	REALISASI 2020 (RP)	SISA DANA DI RKUD
1	Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	154.535.460.000,00	154.535.460.000,00	0,00
2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	568.500.000,00	568.500.000,00	0,00
3	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	22.698.900.000,00	22.698.900.000,00	0,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan BOK KB	40.212.873.648,00	44.346.271.648,00	(4.133.398.000,00)
5	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	483.845.840,00	483.845.840,00	0,00
6	Bantuan Operasional Sekolah	2.777.368.750,00	2.777.368.750,00	0,00
7	Jaminan Persalinan	5.868.462.366,00	2.950.859.366,00	2.917.603.000,00
8	Dana Akreditasi Puskesmas	968.180.000,00	0,00	968.180.000,00
9	Pengawasan Obat dan Makanan	247.615.000,00	0,00	247.615.000,00
Jumlah		316652.213.554,00	308.643.674.770,00	0,00

Sumber: Bidang Perbendaharaan BKAD



BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2020

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal serta Aset Tetap Lainnya. Adapun realisasi belanja modal TA 2020 secara keseluruhan sebesar Rp. 216.401.997.679,94 atau 92,43% dari anggarannya sebesar Rp. 234.111.281.876,00. Rincian anggaran dan realisasi dari belanja modal TA 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Tanah	6.770.845.978,00	6.218.148.953,00
2	Peralatan dan mesin	80.264.079.869,00	76.415.025.209,00
3	Gedung dan bangunan	28.832.823.095,00	26.744.640.157,39
4	Jalan, irigasi dan jaringan	117.250.646.434,00	106.050.091.860,55
5	Aset tetap lainnya	912.886.500,00	900.265.500,00
6	Aset lainnya	80.000.000,00	73.826.000,00
	Jumlah	234.111.281.876,00	216.401.997.679,94

Sumber:BKAD,2020

BPKPAD News



UNTUK KE SEMBILAN KALINYA PEMKAB BANTUL RAIH OPINI WTP

Kembalinya Pemerintah Kabupaten Bantul menerima Opini WTP untuk ke sembilan kalinya adalah buah dari adanya sinergitas yang baik antara eksekutif dan legislatif. Dan pencapaian ini tentunya menjadi amanah yang akan memotivasi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kualitas tata kelola APBD, akuntabilitas dan dapat menyesuaikan dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah, ucap Bupati Bantul

saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2020. Disampaikan juga oleh Bupati Bantul bahwa tujuan akhir daripada Opini WTP ini adalah meningkatnya kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dari setiap alokasi anggaran.



RAKOR EVALUASI DAN SOSIALISASI BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pada tanggal 10 Februari 2021 BKAD Kabupaten Bantul menyelenggarakan acara Rakor Evaluasi dan Sosialisasi Bantuan Keuangan dan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Ruang Parangkusumo Hotel Ros Inn Yogyakarta. Acara dibuka oleh Kepala BKAD Kabupaten Bantul yang sekaligus menjadi nara sumber, didampingi Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset. Adapun peserta yang hadir adalah dari Inspektorat Kabupaten Bantul, Lurah dan perwakilan Kapanewon se Kabupaten Bantul.

Kepala BKAD (Drs. Trisna Manurung) menyampaikan bahwa pada Tahun 2020 anggaran BKK dan P2MD tidak dapat terealisasi karena pada bulan Maret harus dorefocusing. Kemudian dalam APBDP TA 2020, anggaran BKK tersebut dianggarkan kembali sehingga dapat terealisasi 100 % meskipun waktunya mundur dari jadwal. Selain itu untuk anggaran ADD juga dorefocusing sehingga untuk pencairan ADD Tahap I

yang dapat dicairkan hanya untuk belanja wajib mengikat saja. Sesuai dengan SE Kemenkeu Nomor : SE-2/PK/2021 dinyatakan bahwa DD TA 2021 terdapat ketentuan untuk BLT dan paling sedikit 8 % dari DD untuk kegiatan penanganan Pandemi Covid 19 yang merupakan kewenangan desa untuk aksi desa aman Covid 19.



Penyerahan Secara Simbolis SPPT PBB P2 dan Penyampaian Penghargaan bagi Wajib Pajak Panutan Kabupaten Bantul Tahun 2021

Pada hari Senin, 29 Maret 2021, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan acara Penyerahan Secara Simbolis SPPT PBB P2 dan Penyampaian Penghargaan bagi Wajib Pajak Panutan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Dalam acara tersebut juga dilaksanakan pembayaran PBB P2 menggunakan aplikasi Bank BPD DIY Mobile oleh Bupati Bantul, Wakil Bupati Bantul, Sekretaris Daerah Kabupaten

Bantul, dan Kepala BKAD Bantul. Kemudian Bupati Bantul juga memberikan piagam penghargaan kepada Wajib Pajak Panutan PBB P2 yang telah taat membayar pajak di awal waktu, serta kepada Lurah di 5 Kalurahan yang per tanggal 28 Maret 2021 kemarin telah mencapai realisasi 100% dalam pembayaran PBB P2 yaitu, Kalurahan Temuwuh, Jatimulyo, Dlingo, Terong dan Mangunan.



SOSIALISASI PELAPORAN SPT

Pada Selasa, 23 Maret 2021 Bidang Perbendaharaan BKAD Kab. Bantul menyelenggarakan acara Sosialisasi Pelaporan SPT Masa di ruang rapat Gedung Induk Parasamya. Acara tersebut dihadiri oleh Asisten Sekretaris Daerah (Ir. Pulung Haryadi, M.Sc), Kepala BKAD Kabupaten Bantul, Bendahara Pengeluaran OPD se-Bantul serta narasumber dari KPP Pratama Bantul. KPP Pratama Bantul mengimbau untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, kewajiban penyampaian SPT

masa bisa disampaikan secara online sebelum tanggal 31 Maret 2021, jadi tidak perlu harus ke Kantor Pajak Pratama.



PEMKAB BANTUL APRESIASI WAJIB PAJAK AKTIF

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan acara Monitoring dan Evaluasi serta Pengundian Hadiah atas Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan tahun 2021 periode pembayaran 1 Januari sampai 15 Agustus 2021

untuk jatuh tempo 30 September 2021.

Acara tersebut dilaksanakan tidak lain adalah dalam rangka terwujudnya kepatuhan masyarakat luas dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB P2 lebih awal tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo pembayaran dan sebagai bentuk apresiasi Pemkab Bantul terhadap wajib

pajak yang telah menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak.

Bupati Bantul mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang secara tidak langsung berperan aktif dalam pembangunan Kabupaten Bantul. Walaupun ditengah situasi pandemi, masyarakat masih dengan sukarela berpartisipasi dalam membayar pajak demi Bantul tercinta.

Sedangkan Kepala BKAD Kabupaten Bantul menyampaikan

bahwa ada 21 kalurahan yang pajaknya sudah lunas antara lain Kalurahan Gadingharjo, Gadingsari, Murtigading, Tirtohargo, Parangtritis, Donotirto, Tirtosari, Tirtomulyo, Sriharjo, Kebonagung, Karangtalun, Girirejo, Imogiri, Mangungan, Muntuk, Dlingo, Temuwuh, Jatimulyo, Terong dan Bawuran. Dan sebagai penghargaan untuk wajib pajak, sudah disediakan hadiah undian berupa sepeda motor dan beberapa alat elektronik.



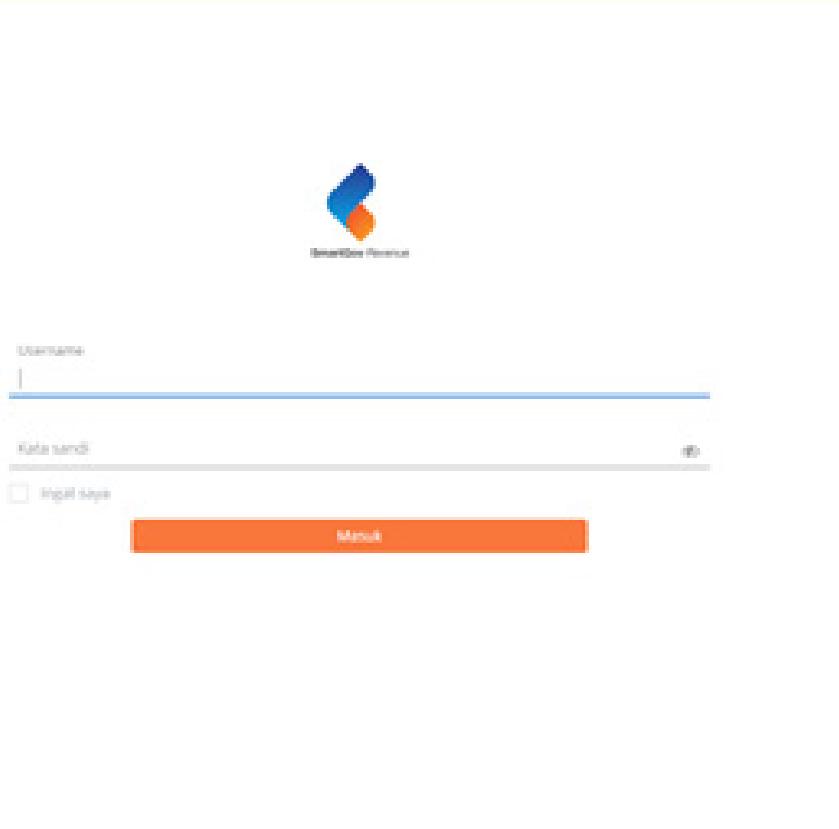
PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pada tanggal 14 sampai dengan 17 September 2021, Bidang Akuntansi BKAD Kabupaten Bantul menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD yang diikuti oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dengan nara sumber dari BPKP DIY diharapkan pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan para pembuat laporan keuangan di semua OPD dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.



SMART GOVERNANCE DENGAN APLIKASI DAN INOVASI YANG SMART



Smart governance atau tata kelola pemerintahan yang cerdas adalah pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi. Intinya adalah adanya sebuah inisiatif yang dapat menyeimbangkan kemajuan teknologi dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik.

Di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul saat ini telah menerapkan 8 macam aplikasi dan juga inovasi sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja ASN yang berkualitas dan efektif dalam melaksanakan pekerjaan maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mudah dan praktis.

Adapun aplikasi yang ada di BKAD Kabupaten Bantul adalah :

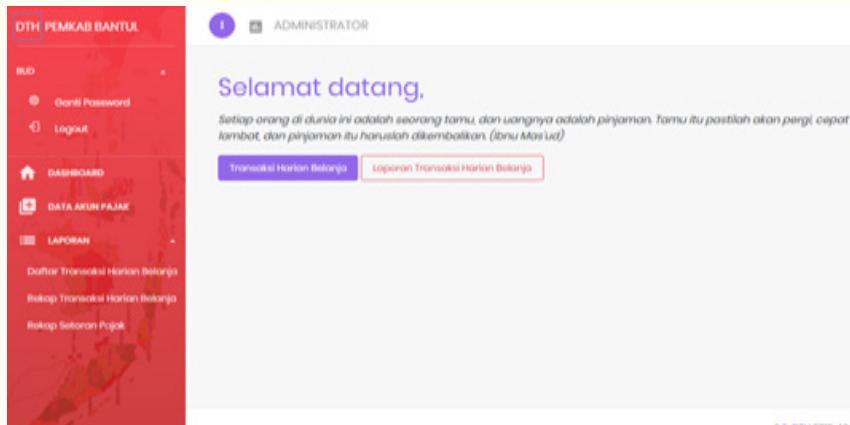
1. Aplikasi SIDAT KEUDA (Sistem Data Transaksi Keuangan Daerah)



Sistem Informasi Data (SIDAT) Keuangan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Bantul. Sistem Aplikasi ini di gunakan untuk cek data.

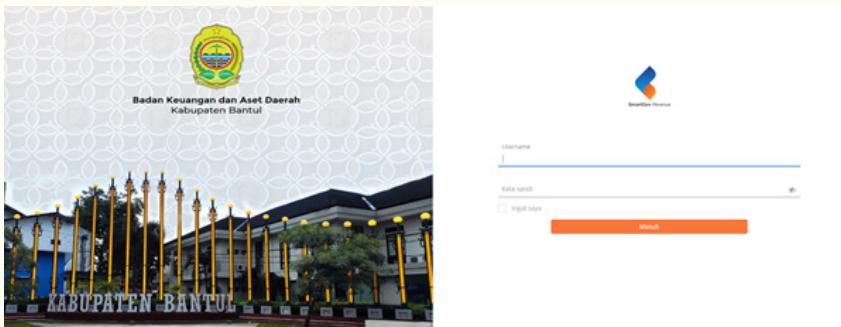
Aplikasi ini dipakai dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul lebih transparansi dimana masyarakat dapat berperan aktif ikut mengawasi penggunaan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Selain itu melalui SIDAT KEUDA dapat dipergunakan sebagai alat kontrol oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran terhadap realisasi anggaran belanja daerah di masing-masing perangkat daerah.

2. Aplikasi DTH-RTH (Data Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah)



Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 tanggal 31 Mei 2019 pada pasal 7, Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan /Pemungutan dan Penyetoran Pajak Atas Belanja yang bersumber dari APBD, bahwa semua Bendahara Pengeluaran SKPD wajib membuat Daftar Transaksi Harian (DTH) pajak yang dipotong atas belanjanya. Dan sejak tahun 2019 BKAD Kabupaten Bantul menggunakan aplikasi DTH RTH sebagai jembatan bendahara pengeluaran dalam pelaporan Data Transaksi Harian.

3. SmartGov serta CityGov



Pada bulan Oktober 2020 BKAD Kab Bantul telah bekerjasama dengan PT Cartenz Technology Indonesia dalam pengembangan aplikasi SmartGov serta CitiGov guna mendekatkan masyarakat dengan layanan langsung atas Pajak Daerah. Pada tahun 2020 – 2021 ini BKAD baru mengembangkan Modul PBB dan BPHTB sebagai penganti Aplikasi SISMIOP (Sistem Informasi dan Manajemen Obyek Pajak). Dan diharapkan untuk tahun berikutnya akan dikembangkan untuk modul Pajak Daerah lainnya, sehingga dalam pengelolaan pajak daerah dapat terpusat dalam satu system aplikasi yang sama.

4. Aplikasi SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah) dan e-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)



Aplikasi SIMPATDA merupakan sistem yang dikembangkan untuk mempermudah pembukuan pelaporan serta pengarsipan data atas wajib pajak. Dan guna mendukung aplikasi SIMPATDA dibangun aplikasi baru yakni e-SPTPD untuk monitoring pelaporan dan pembayaran secara online terhadap pajak daerah.

5. Aplikasi SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah)

The screenshot shows the SIKD Core application interface. On the left, there is a sidebar with navigation links such as Home, Beranda, SIKD Core, Penggunaan, Pengeluaran, Pengembangan, Status Data, Monitoring Penyampaian Data, Laporan, Verifikasi Data, Gaji PNSD, and Bantuan. The main content area is titled "Monitoring Data" and "Penyampaian Gaji PNSD". It features a search bar and filters for "Tahun" (Year), "Data Bulan" (Data Month), "Gaji PNSD", "Periode", and "Status valid". Below this is a table with columns for "Kode" (Employee ID), "Nama Pegawai" (Employee Name), and months from "Januari" to "Desember". The table rows include:

Kode	Nama Pegawai	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	July	Agustus	September	Oktober	November	Desember
12.00	Penerimaan Dik Republik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.01	Kab. Bantul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.02	Kab. Sleman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.03	Kab. Kulon Progo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.04	Kab. Yogyakarta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.05	Kota Yogyakarta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.06	Kota Sleman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.07	Kota Kulon Progo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.08	Kota Bantul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.09	Kota Prambanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.10	Kota Ngawi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.11	Kota Klaten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.12	Kota Magelang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.13	Kota Temanggung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.14	Kota Cirebon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.15	Kota Purworejo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.16	Kota Pati	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.17	Kota Semarang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.18	Kota Solo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.19	Kota Magetan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.20	Kota Jepara	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.21	Kota Bojonegoro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.22	Kota Ngawi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.23	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.24	Kota Kediri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.25	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.26	Kota Pasuruan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.27	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.28	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.29	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.30	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.31	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.32	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.33	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.34	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.35	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.36	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.37	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.38	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.39	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.40	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.41	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.42	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.43	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.44	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.45	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.46	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.47	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.48	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.49	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.50	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.51	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.52	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.53	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.54	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.55	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.56	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.57	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.58	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.59	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.60	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.61	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.62	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.63	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.64	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.65	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.66	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.67	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.68	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.69	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.70	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.71	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.72	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.73	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.74	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.75	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.76	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.77	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.78	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.79	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.80	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.81	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.82	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.83	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.84	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.85	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.86	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.87	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.88	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.89	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.90	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.91	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.92	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.93	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.94	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.95	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.96	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.97	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.98	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.99	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.100	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.101	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.102	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.103	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.104	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.105	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.106	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.107	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.108	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.109	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.110	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.111	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.112	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.113	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.114	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.115	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.116	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.117	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.118	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.119	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.120	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.121	Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.122	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.123	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.124	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.125	Kota Blitar	✓	✓										

6. Aplikasi LAPAK (Layanan Aplikasi Pajak Bantul)



LAPAK Bantul : Layanan Aplikasi Pajak Kab. Bantul

Pemerintah Kabupaten Bantul Keuangan

Siapa saja

Tambahkan ke Wishlist

★★★★★ 50

The screenshot shows the LAPAK Bantul mobile application interface. It features a yellow circular logo at the top left with a blue shield containing a white 'P'. Below the logo is the app's name. At the top right is a five-star rating and 50 reviews. The main screen displays three cards: one with the Bantul district crest, another with a cartoon character holding a 'TAX' document, and a third showing a person interacting with a mobile device displaying payment information. To the right is a sidebar with navigation links: Home, PBB-P2, Info Pajak, and Layanan Aduan.

LAPAK Bantul adalah aplikasi android Layanan Informasi Pajak Daerah Kabupaten Bantul. Wajib pajak PBB-P2 dapat memperoleh informasi riwayat pembayaran SPPT, informasi objek / wajib pajak, serta jadwal layanan bergerak (mobil pajak keliling).

LAPAK adalah sistem layanan pajak yang berbasis pada smart phone/android. Dengan layanan ini diharapkan masyarakat akan lebih mudah dan cepat dalam mengakses layanan dan informasi pajak daerah.

7. Aplikasi SIMAS (Sistem Informasi Manajemen Aset)



SIMAS Kabupaten Bantul

Administrator Login

E-Mail

Password

Ingatkan Saya

LOGIN >

The screenshot shows the SIMAS Kabupaten Bantul login page. It has a teal header bar with the text 'SIMAS Kabupaten Bantul'. Below it is a large yellow and green emblem. The main area contains fields for 'E-Mail' and 'Password', a 'Remember Me' checkbox, and a 'LOGIN >' button.

Pengelolaan aset yang baik tentu saja akan memudahkan dalam pengendalian dan pelaporan kepada pihak lain seperti BPK dan Inspektorat. Oleh karena itu guna mencapai tata kelola aset barang milik daerah yang baik, BKAD Kabupaten Bantul telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS).

8. Aplikasi SIMPERSADA (Sistem Informasi Manajemen Persediaan dan Aset Daerah)

Persediaan Aset Bantul

Login

Email

Password

Tahun Pilih

Remember Me

[Forgot Your Password?](#)

Aplikasi SIMPERSADA ini dirancang sebagai upaya dalam meningkatkan administrasi dan inventarisasi data persediaan dan aset daerah yang tepat serta akuntabel.

Sebagaimana aplikasi yang ada di BPKPAD tersebut diatas, Mobil Keliling Pajak yang sempat mendapat penghargaan sebagai TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik merupakan sebuah bentuk layanan jemput bola dalam pembayaran pajak yang benar-benar efektif dan inovatif . Masyarakat akan menjadi lebih mudah bahkan lebih bersemangat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak.





Penyerahan Secara Simbolis SPPT PBB P2 dan Penyampaian Penghargaan bagi Wajib Pajak Panutan Kabupaten Bantul Tahun 2021



Monitoring dan evaluasi serta pengundian hadiah wajib pajak



Sosialisasi Aplikasi Citigov



Sosialisasi dan rapat koordinasi terkait PBB di Kapanewon Pleret



FORUM PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENSTRA TAHUN 2021–2026





Tim Lelang BKAD bersama KPKNL DIY

